

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori menjelaskan teori yang melandasi dan berkaitan dengan studi. Menurut Chalmers (1983:83-84) teori harus dipandang sebagai keutuhan struktur sumber ilmu yang berkaitan dengan observasi dan teori yang tersusun secara koheren. Di dalamnya teori disusun sebagai petunjuk dalam pengembangan teori lebih lanjut.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan kebijaksanaan pemerintah dan swasta dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (Meier, 1970:7). Masalah pokok dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada kekhasan daerah masing-masing dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi pembangunan ini mengarahkan pada inisiatif daerah dalam proses menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Badrudin, 2013:113).

Wicksell dalam Pressman (2000:125-126) dan Kuznet dalam Pressman (2000:177) bahwa faktor jumlah stok modal dan perkembangannya dari waktu ke waktu akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kusreni (2009) bahwa setiap usaha pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha tersebut pemerintah beserta swasta harus bersama-sama mengambil kesempatan dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi yang diperlukan. Pendekatan teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dirumuskan dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar dalam kerangka berpikir dan rencana tindakan dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets dalam Jhingan (2000:57), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu

negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen:

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dan meningkatnya secara terus menerus persediaan barang.
2. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk.
3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sebagai inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Menurut Sukirno (2003:415), Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan *Gross Domestic Product* atau perubahan tingkat ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah produksi dan barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Menurut BPS (2016), salah satu indicator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data PDR, dari data PDRB ini berguna untuk :

- a. PDRB atas harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar akan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, ini berlaku sebaliknya.
- b. PDRB atas dasar harga konstan (riil) secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- c. Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah.
- d. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- e. Dalam PDRB per kapita atas harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama

periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nilai tambah yang mampu dihasilkan suatu daerah tertentu, sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pendapatan regional PDRB adalah jumlah nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian maka nilai PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki pada periode waktu tertentu (biasanya selama satu tahun). Dalam hal ini kepemilikan faktor produksi berpengaruh besar terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat berguna sebagai alat perencanaan dan analisis kebijakan ekonomi, misalnya analisis untuk menentukan peningkatan pajak daerah beserta dampaknya, mengukur laju pertumbuhan ekonomi, perubahan sektor ekonomi, mengukur laju inflasi khususnya inflasi di tingkat harga produsen, mengukur produktivitas kerja sektoral serta tingkat kesejahteraan umum melalui nilai PDRB per kapita.

Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan ke dalam tiga pengertian:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah dari produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh setiap unit usaha di suatu daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, biasanya setahun.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Balas jasa tersebut adalah upah atau gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Kesemuanya dinilai sebelum dipotong dengan pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam perhitungan ini termasuk juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung netto.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah/regional. Ekspor netto di sini adalah ekspor dikurangi impor.

Dari ketiga pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah nilai produk barang jasa akhir yang dihasilkan di suatu wilayah sama dengan jumlah balas jasa faktor produksi dan sama juga dengan jumlah pengeluaran untuk berbagai

keperluan. PDRB tersebut selanjutnya disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena masih mencakup pajak tak langsung netto.

Ekonomi pembangunan menurut Djoyohadikusomo (1994:1-9) adalah ilmu yang mempelajari perubahan pada suatu tata susunan ekonomi masyarakat yang menyeluruh sebagai suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu ekonomi pertumbuhan lebih menekankan pada ilmu yang mempelajari proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dan kedua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan lebih luas dan komprehensif. Ekonomi pertumbuhan mempelajari kenaikan pendapatan nasional tanpa memandang terjadi tidaknya proses perubahan struktur ekonomi, sementara itu ekonomi pembangunan menekankan adanya proses terjadinya kenaikan pendapatan nasional dan per kapita suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan sistem kelembagaan baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum yang berefek pada perubahan struktural dan transformasi kelembagaan.

Pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi fokus pada subjek proses, untuk lebih umumnya penggunaan istilah pertumbuhan ekonomi bagi negara maju sedangkan pembangunan ekonomi untuk negara sedang berkembang (Arsyad, 2010:12). Oleh karena itu keberhasilan pembangunan ekonomi akhirnya tidak hanya ditentukan oleh percepatan pertumbuhan ekonomi tetapi juga diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih menyeluruh.

2.1.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Menurut Sukirno (2007:243-268) dan Badrudin (2012:117-119) menjelaskan teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi:

1. Teori Ekonomi Klasik dan Modern

Menurut pandangan ahli-ahli Klasik ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan ahli ekonomi Klasik adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka peranan tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan yang dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok taman, perdagangan, dan tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu

dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi, pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ini, dalam upaya peningkatan produktivitas kerja. Dalam pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi (Kuncoro, 1997).

Pendekatan teori pembangunan ekonomi model pertumbuhan linier atau klasik seperti Adam Smith, Ricardo, dan Arthur Lewis yang berkembang pada era 1950-1960an menjelaskan pembangunan ekonomi untuk meraih pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berjalan dengan memperoleh sejumlah tabungan, investasi dan bantuan luar negeri. Selanjutnya pendekatan struktural yang muncul pada era 1970 an seperti Harrod - Domar, Kaldor, dan Kuznet yang dalam model ini menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistik sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun muncul teori ketergantungan dengan adanya ketergantungan daerah pinggiran terhadap daerah metropolitan yang kapitalis. Pada era 1990 terjadi perubahan model teori ketergantungan dengan teori neo klasik melalui peran perdagangan bebas, keterbukaan ekonomi, dan privatisasi perusahaan publik. Model neo klasik memandang bahwa ketergantungan suatu negara menjadi semakin bertambah karena ketidakmampuan aspek teori ketergantungan dalam mengelola eksploitasi faktor eksternal dan internal seperti faktor luar negeri dan struktur sosiokultural dan pola perilaku masyarakat yang mengakibatkan intervensi pemerintah berupa regulasi dalam perekonomian.

2. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan tentang peranan pengusaha yang akan melakukan inovasi dan investasi dalam kegiatan ekonomi. Investasi yang baru akan meninggalkan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan tingkat konsumsi menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan investasi baru.

3. Teori Harrod-Domar

Teori ini menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Dalam teori ini disebutkan bahwa jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan berinvestasi suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh. Pada dasarnya teori ini menentukan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan.

Teori ini menganggap setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Rasio modal output (COR) sebagai suatu hubungan antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut (Arsyad, 1999).

4. Teori David Ricardo

Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan membuat upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat dipergunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami stagnan (*stationary-state*).

5. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Melalui kajian empirikal teori ini menunjukkan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Robert Solow (1956), berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut.

6. Teori Walt Witman Rostow

Bermula dari artikel yang dimuat dalam *Economies Journal* (1956) dan dikembangkan dalam buku *The Stages of Economies Growth* (1960) bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dibedakan dalam lima tahapan yaitu

tradisional, prasyarat tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi yang berdasarkan karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Menurut Rostow pembangunan ekonomi adalah proses transformasi masyarakat tradisional ke masyarakat modern dengan beberapa indikasi yaitu: 1) perubahan struktur ekonomi ditandai dengan menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan sektor industri, 2) proses perubahan orientasi organisasi ekonomi, sosial dan politik dari suatu daerah dengan orientasi keluar, 3) perubahan pandangan masyarakat mengenai anak dan keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga kecil, 4) perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari investasi tidak produktif ke investasi produktif, 5) perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang lebih merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Arsyad, 2010:62).

2.1.1.3 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2004:92) ada tiga faktor utama yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu akumulasi modal yang meliputi semua investasi baru, pertumbuhan penduduk yang memperbanyak tenaga kerja, dan kemajuan teknologi berupa cara-cara perbaikan barang dan menangani pekerjaan. Adam Smith menyatakan bahwa terjadinya akumulasi modal dan tenaga kerja berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Unsur produksi menurut Adam Smith terdiri dari sumber daya tanah, sumber daya manusia dan stok modal yang ada. (Spechler, 1990:46).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat

mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan di antaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan di antaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

5. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

2.1.2 Investasi

2.1.2.1 Pengertian Investasi

Secara umum investasi meliputi penambahan barang-barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, dan pembukaan tanah baru. Teori ekonomi mengartikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa yang akan depan (Samuelson, 2004:137 dan Sukirno, 2007:271).

Pengertian investasi ini mempertegas apa yang telah disampaikan oleh Lewis (1993:75) bahwa investasi sebagai permintaan barang-barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa yang akan datang. Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah.

Peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan per kapita sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi pada hakikatnya merupakan cara yang dapat dilakukan oleh swasta maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan dalam jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003) Investasi ini memiliki 3 (tiga) peran:

1. Merupakan salah satu pengeluaran agregat, di mana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini menstimulasi pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat

Menurut Arsyad (2004:64), Korelasi positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan secara sederhana namun jelas di dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod Domar Teori Harrod Domar (1947) dikemukakan oleh Evsey domar dan R E Harrod mengemukakan model pertumbuhan ekonomi yang merupakan perkembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan investasi yang sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa:

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh
2. Dalam perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan, berarti sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol).
4. Kecenderungan untuk menabung besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal dan output dan rasio penambahan modal-output.

Pendapat Todaro (2000:136) tentang tiga faktor utama pertumbuhan ekonomi setiap negara yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi, Menurut Solow dan Swan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi dalam Arsyad (2010:88-89).

Menurut Harrod-Domar dalam Arsyad (2010:85-87) dan Todaro (2009:96) bahwa dalam pertumbuhan ekonomi peranan investasi memperbesar kapasitas produksi yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat dan pendapatan nasional. Sesuai dengan pemikiran Ricardo dan Smith, bahwa peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, *the law of diminishing return* dan memperlambat penurunan tingkat hidup (Skousen, 2009:123).

Menurut Raharjo (2006:32), Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi swasta adalah dengan

mengusahakan keadaan yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam negeri dan masuknya investasi asing. Sejalan dengan semakin meningkatnya investasi yang berasal dari swasta baik investasi dengan fasilitas PMDN maupun non fasilitas, diharapkan dapat meningkatkan PDRB dari tahun ke tahun.

Pemerintah membagi kegiatan penanaman modal yang berusaha di wilayah Negara Republik Indonesia ke dalam PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal oleh investor asing yang menggunakan modal asing baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian (dengan cara berpatungan bersama investor dalam negeri). Dan Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan modal oleh penanaman modal dalam negeri dengan modal keseluruhannya dan dalam negeri.

Menurut Todaro (2006:259), Arus sumber-sumber keuangan internasional dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang pertama adalah penanaman modal asing yang dilakukan pihak swasta (*private foreign investment*) dan investasi portofolio, terutama berupa penanaman modal asing “langsung” yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional. Di samping itu, terdapat pula arus permodalan serupa dari bank-bank swasta internasional, yang dana investasinya berupa portofolio.

Menurut pandangan kaum klasik dalam Sukirno (2007:256), pembentukan modal merupakan suatu pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu masyarakat untuk meningkatkan produksi. Bagi kaum Klasik, pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah barang-barang modal dalam masyarakat. Kalau kesanggupan itu bertambah, maka dengan sendirinya produksi dan pendapatan nasional akan bertambah tinggi dan pembangunan ekonomi akan tercipta. Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisional (*the traditional society*), prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take off*), tinggal landas (*take off*), menuju kedewasaan (*the drive maturity*) dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*). Rostow dan Musgrave dalam Mangkusoebroto (1999:170, 2008:170) menjelaskan bahwa pada tahap pembangunan menengah investasi swasta sudah berperan besar tetapi peran investasi pemerintah bisa juga tetap besar. Untuk menjalankan fungsi stabilisasi. Fungsi ini untuk tahap pembangunan menengah terjadi kegagalan pasar dari peranan investasi swasta yang besar sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa dalam jumlah besar dan kualitas yang baik.

Menurut Schumpeter dalam Pressman (2000:155) pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi terus menerus tapi mengalami keadaan manakala berkembang dan terkadang mengalami kemunduran. Konjungtor tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (*entrepreneur*) melakukan inovasi dalam kegiatan mereka

menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi diperlukan investasi yang dapat meningkatkan ekonomi.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Investasi

Menurut Sianturi (2009:16), berdasarkan kekhususan tertentu dan kegiatannya, investasi dibagi dalam kelompok:

1. Investasi Baru

Investasi baru yaitu investasi bagi pembuatan sistem produksi baru, baik sebagai bagian dari usaha baru untuk produksi baru maupun perluasan produksi, tetapi harus menggunakan sistem produksi baru.

2. Investasi Peremajaan

Investasi jenis umumnya hanya digunakan untuk mengganti barang-barang kapital lama dengan yang baru, tetapi masih dengan kapasitas dan ongkos produksi yang lama dengan alat yang digantikannya.

3. Investasi Rasionalisasi

Pada kelompok ini peralatan yang lama diganti oleh yang baru tetapi dengan ongkos produksi yang lebih murah, walaupun kapasitas sama dengan yang digantikannya.

4. Investasi Perluasan

Dalam kelompok investasi ini peralatannya baru sebagai pengganti yang lama. Kapasitasnya lebih besar sedangkan ongkos produksi masih lama

5. Investasi Modernisasi

Investasi ini digunakan untuk memproduksi barang baru yang memang proses baru, atau memproduksi lama dengan proses yang baru.

6. Investasi Diversifikasi

Investasi ini untuk memperluas program produksi perusahaan tertentu, sesuai dengan program diversifikasi kegiatan usaha korporasi yang bersangkutan.

Jenis- jenis investasi berdasarkan dari pelaku terbagi 2 (dua), yaitu:

1. *Autonomous Investment* (Investasi Otonom)

Investasi otonom adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Artinya tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Investasi ini dilakukan oleh pemerintah karena di samping biayanya sangat besar. investasi ini juga tidak memberikan keuntungan, maka swasta tidak dapat melakukan investasi jenis ini karena tidak memberikan keuntungan langsung.

2. *Induced Investment* (Investasi Dorongan)

Investasi dorongan adalah investasi yang besar kecilnya dipengaruhi oleh

tingkat pendapatan. Baik itu pendapatan daerah maupun pendapatan pusat atau nasional. Investasi ini dilakukan akibat adanya pertambahan permintaan, di mana pertambahan permintaan tersebut sebagai akibat dari pertambahan pendapatan. Karena permintaan bertambah, maka akan mendorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi permintaan tersebut.

2.1.2.3 Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah akan mengalami multiplier dengan terjadinya kenaikan GNP akibat kenaikan pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa sehingga bertambah output yang lebih besar dan pertambahan investasi yang besar. Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan barang oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam jangka panjang untuk pembangunan, surat berharga, investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial dan lain-lain. Investasi pemerintah dalam pengeluaran belanja berupa pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan berupa belanja modal berkontribusi memberikan layanan kepada masyarakat dan dapat menyerap tenaga kerja sehingga mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan karena kesejahteraan masyarakat meningkat, Berdasarkan Permendagri 13/2006 dan permendagri 59/2007 alokasi belanja daerah terbagi atas komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja modal termasuk belanja langsung yang dialokasikan untuk investasi sektor publik. Halim, (2008), investasi pemerintah adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan manfaat lainnya sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Adolf Wagner dalam Soepangat (1991:42-44) dan Mursinto (2005) pengeluaran pemerintah meningkat dari waktu ke waktu karena bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan. Soepangat (1991:52) menjelaskan peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan barang public akan bermanfaat bagi yang membutuhkan yang perlu diberikan oleh pemerintah yang pembiayaannya dari belanja modal.

Halim (2008:4) mendefinisikan belanja modal sebagai bentuk investasi berupa *capital expenditure* sebagai belanja yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal dapat berupa tanah, gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, jalan, irigasi jaringan dan fisik lainnya. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 53, belanja modal adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringannya dan aset tetap lainnya. Menurut Permendagri No. 59 Th 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Th 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52 belanja modal adalah belanja barang dan jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja modal berupa belanja barang habis pakai. Belanja modal berupa bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, minuman, pakaian dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultan, dan lain-lain pengadaan barang dan jasa dan belanja lainnya yang sejenis.

2.1.2.4 Investasi Swasta

Besarnya nilai investasi yang terealisasi yang berasal dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing merupakan investasi swasta.

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penanaman modal yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970.

Untuk Undang-Undang Tentang Tata Cara Penanaman Modal, lebih jelasnya dapat dilihat di Keppres RI No.97 Tahun 1993. Permohonan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dapat dilakukan oleh PT (Perseroan Terbatas), CV (*Comanditair Venootschap*), Fa (Firma), Koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau Perorangan. Untuk permohonan penanaman modal baru yang berlokasi di 2 (dua) Propinsi atau lebih diajukan kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

b. Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan penanaman modal untuk usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman

modal asing dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri. Bentuk penanaman modal asing ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya (Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 3):

- 1) Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas.
- 2) Membeli saham.
- 3) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2.1.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Menurut Sianturi (2009:19), faktor-faktor yang mempengaruhi investasi adalah sebagai berikut:

a. Tingkat bunga

Tingkat bunga sangat berperan dalam menentukan tingkat investasi yang terjadi dalam suatu negara. Apabila tingkat bunga rendah, maka investasi yang terjadi akan tinggi karena kredit dari bank masih menguntungkan untuk mengadakan investasi. Sebaliknya jika tingkat bunga tinggi, maka investasi kredit bank tidak menguat.

Keynes mengatakan masalah investasi baik ditinjau dari penentuan jumlahnya maupun kesempatan untuk mengadakan investasi itu sendiri, didasarkan pada konsep *Marginal Efficiency of Capital* (MEC). MEC merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dilakukan (*return of investment*).

b. Peningkatan aktivitas perekonomian

Harapan adanya peningkatan perekonomian di masa mendatang, merupakan salah satu faktor penentu untuk mengadakan investasi atau tidak. Kalau ada perkiraan akan terjadi peningkatan perekonomian di masa yang akan datang, walaupun tingkat bunga lebih besar dari tingkat MEC (sebagai penentu investasi), investasi mungkin akan tetap dilakukan oleh investor yang instingnya tajam melihat peluang meraih keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang.

c. Kestabilan politik suatu negara

Kestabilan politik suatu negara merupakan suatu pertimbangan yang sangat penting untuk mengadakan investasi. Karena dengan stabilnya politik negara yang bersangkutan terutama penanaman modal dan luar negeri (PMA) tidak akan ada risiko perusahaannya dinasionalisasikan oleh negara bersangkutan.

d. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi akan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Dengan demikian kemajuan teknologi yang

berlaku di berbagai kegiatan ekonomi akan mendorong lebih banyak investasi. Semakin besar biaya yang diperlukan untuk melakukan perombakan dalam teknologi yang digunakan, maka semakin banyak investasi yang dilakukan.

Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena di samping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Makmun dan Yasin, 2003:64).

Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Dalam investasi ada 2 (dua) tujuan utama yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada. Gambaran perkembangan pembangunan daerah secara makro sektoral tidak lepas dari perkembangan (distribusi dan alokasi investasi antar daerah. Dalam kaitan itu perlu dipisahkan jenis investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah, mengingat faktor yang menentukan lokasi kedua jenis investasi tersebut tidak selalu sama. Umumnya pemerintah masih harus memperhatikan beberapa faktor, seperti pengembangan suatu daerah tertentu karena alasan politis dan strategis, misalnya daerah perbatasan dan daerah yang mempunyai sejarah serta ciri khusus, sehingga memerlukan perhatian yang khusus pula.

Usaha pemerataan pembangunan antar daerah juga merupakan faktor lain yang diperhitungkan pemerintah. Pihak swasta tidak berurusan secara khusus dengan faktor-faktor tersebut. Kalaupun ada keterkaitannya, sifatnya tidak langsung, yaitu melalui berbagai peraturan (Azis, 1985:15). Faktor produksi sering diklasifikasikan menjadi empat, yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Pengklasifikasian terhadap keempat faktor produksi tersebut didasarkan atas perbedaan elastisitas penawaran parsial, karakteristik yang terkandung pada setiap faktor produksi, dan imbalan yang diterima masing-masing pemilik faktor produksi. Secara historis, perbedaan ini bersesuaian dengan berkembangnya *bergaining position* antara tiga kelompok masyarakat, kapitalis, tuan-tuan tanah dan buruh (tenaga kerja). Kekuatan pasarlah yang kemudian menentukan berapa besar imbalan yang akan diterima masing-masing. Tenaga kerja akan mendapatkan upah, tuan tanah mendapatkan sewa tanah, pemilik modal mendapatkan tingkat bunga.

2.1.3. Tenaga Kerja dan Penyerapannya

Menurut Sumarsono (2006:7), tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja, artinya bahwa semua orang yang melakukan kegiatan pekerjaan untuk diri sendiri atau orang lain tanpa menerima upah atau mereka yang sanggup bekerja. Menurut Simanjuntak (1998), yang termasuk tenaga kerja adalah seseorang yang mengurus rumah tangga, sekolah, yang mencari kerja, atau sedang bekerja dengan usia 14-60 tahun.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun - 64 tahun. Menurut pengertian ini setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebut di atas 20 tahun.

Menurut Todaro (2006:310) Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dan pertumbuhan penduduk tergantung kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal, dan tersedianya input dan faktor produksi penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Berdasarkan profil tenaga kerja menurut BPS pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam pengumpulan data Sakemas adalah konsep dasar angkatan kerja. Penduduk dilihat dari sisi ketenagakerjaan dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja digolongkan menjadi penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya). Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu.

Menurut BPS Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja atau sementara tidak bekerja dan pengangguran. Yang termasuk kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode pendataan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tenaga atau lainnya (pensiun, penerima transfer, penerima pendapatan/bunga bank, jompo atau alasan lain). Menurut Ananta (1991:2) tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang unik karena tenaga kerja berbeda dengan faktor produksi lainnya seperti tanah, mesin dan uang. Perbedaan utama tersebut adalah sumber daya / tenaga kerja tidak dapat dipisahkan secara fisik dari tenaga kerja itu sendiri, sebaliknya tanah dapat dimanfaatkan untuk suatu produksi tanpa pemilik tanah itu berada di lokasi produksi.

Kesempatan kerja menurut Tambunan (2001:60) adalah banyak orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Kesempatan kerja akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia, apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Pertumbuhan angkatan kerja yang cepat disatu sisi namun sisi lainnya tingkat pertumbuhan lapangan kerja relatif lambat, merupakan masalah di negara berkembang termasuk Indonesia. Masalah yang sering muncul dalam ketenagakerjaan ini adalah terjadinya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja yang dikenal dengan *excess supply*. Pentingnya faktor tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi menurut Lewis dalam Ananta (1988:128) bahwa kelebihan tenaga kerja di satu sektor (pertanian) memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan output dan penyediaan tenaga kerja di sektor lainnya (industri).

Pandangan ekonomi kapitalis terhadap tenaga kerja tidak terlepas dari konsep faktor produksi atau input. Perkembangan iklim usaha menuntut adanya penyesuaian Perlakuan terhadap tenaga kerja. Pada awalnya ada kecenderungan tenaga kerja dianggap sebagai suatu faktor produksi lainnya yang memberikan kontribusi relatif tetap terhadap produksi.

Pandangan ini yang menghasilkan sistem pengupahan tetap terhadap tenaga kerja sebagaimana input tanah mendapatkan sewa tetap dan modal mendapatkan bunga. Adanya ketidakstabilan sifat dan karakter tenaga kerja, mendorong perusahaan untuk memberikan perlakuan lain terhadap tenaga kerja. Jika tanah dan modal dapat diperjualbelikan di pasar sedangkan tenaga kerja tidak demikian. Namun demikian, hal ini tidak cukup menjadikan alasan bagi aliran ekonomi utama (*mainstream economy*) untuk melakukan pembedaan analisis terhadap faktor produksi lain.

Tenaga kerja dibedakan dengan *entrepreneur* (wirausaha) adalah lebih didasarkan atas perbedaan karakter intrinsik yang ada pada kedua faktor produksi tersebut. Entrepreneur dipandang sebagai tenaga kerja yang berani mengambil risiko, sehingga ia berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan risiko yang diambil dan nilainya belum tentu tetap. Tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya (mengolah tanah dan memanfaatkan modal) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai suatu investasi dan banyak perusahaan yang memberikan pendidikan kepada karyawannya sebagai wujud kapitalisasi tenaga kerja.

2.1.4. Disparitas Pendapatan

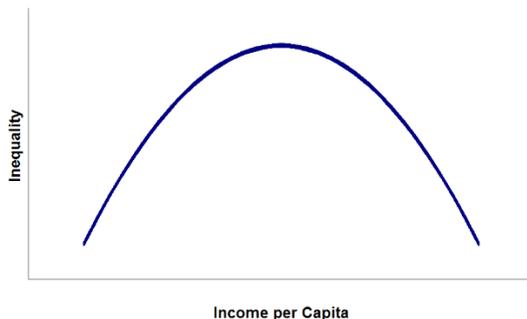
Masalah disparitas pendapatan merupakan salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh berbagai negara miskin atau negara sedang berkembang dalam melaksanakan pembangunan ekonominya. Tidak sedikit negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi mulai menyadari bahwa pertumbuhan semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali gagal untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan kemiskinan absolut. Pertumbuhan PDB per kapita yang cepat tidak secara otomatis dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, karena apa yang disebut dengan proses '*trickle down efect*' dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan (Arsyad, 1988:165).

Pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat yang terus mengalami peningkatan dalam jangka panjang merupakan akibat dari meningkatnya pembangunan ekonomi daerah tersebut. Tujuan pembangunan ekonomi bukan hanya semata-mata menciptakan masyarakat modern, tetapi yang lebih penting adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat tersebut. Tujuan ini tidak akan tercapai jika pembangunan ekonomi mengakibatkan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat menjadi semakin memburuk keadaannya.

Adelman dan Moris (dalam Kuncoro, 1997:98) berpendapat bahwa kesenjangan pendapatan di daerah ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran negara, sumber daya alam, dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain, faktor kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan selain pertumbuhan ekonomi.

Kuznets (1955:1-28) menganalisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju, dan mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya distribusi pendapatan semakin membaik, hal inilah yang dikenal dengan hipotesis "U-terbalik" Kuznets, bentuk rangkaian perubahan kecenderungan

distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini, pertumbuhan GNP per kapita seperti yang disajikan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 (Hypothetical Kuznets curve)

Terdapat banyak pendapat yang mencoba untuk menjelaskan mengapa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, untuk kemudian membaik. Sebagian besar pendapat tersebut mengaitkannya dengan kondisi dasar perubahan struktural, bahwa pada tahap pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern (dalam model Lewis), lapangan kerja terbatas, namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. Kesenjangan pendapatan antar sektor industri modern dengan sektor pertanian tradisional pada awalnya melebar dengan cepat sebelum akhirnya menyempit kembali.

Ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia dikelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan : 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Katagori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria :

- a. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk katagori 40% terendah terhadap total pendapatan penduduk seluruh penduduk kurang dari 12% dikatagorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12-17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang-menengah.
- c. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan menurut definisi Bank Dunia tahun 2007 sebagai salah satu kondisi di mana seseorang tidak dapat menikmati kebutuhan dasarnya yang meliputi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. Orang miskin absolut menurut Bank Dunia adalah orang yang hidup dengan pendapatan di bawah \$ 1 per hari, kemiskinan menengah dengan pendapatan di bawah \$ 2 hari. Kemiskinan merupakan tahapan yang harus dilewati dalam perkembangan ekonomi suatu daerah dan pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikkelsen, 2003:104).

Pengertian kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada di bawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu besarnya rupiah, yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan (setara 2100 kalori/kapita/hari) dan non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya. Atas dasar kebutuhan minimal yang harus dicukupi untuk hidup maka di tentukan biaya garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS untuk memperkirakan jumlah dan persentase penduduk miskin.

Ukuran kemiskinan menurut Kuncoro (2006:111) membedakan 3 (tiga) golongan yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan di mana hasil pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini menentukan tingkat pendapatan minimal yang cukup memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, perumahan guna menjamin kelangsungan hidupnya. Kesulitan utama konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan tetapi juga iklim, tingkat kemajuan negara bersangkutan serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Untuk hidup layak seseorang membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

Menurut Kuncoro (1997:106) penyebab kemiskinan secara makro karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal. Rendahnya tingkat kemiskinan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena menurut Todaro dan Smith (2006:22) kesejahteraan merupakan ukuran pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagian besar penelitian membuktikan adanya faktor penentu keberhasilan investasi, perekonomian suatu negara terutama di negara Eropa seperti yang diteliti oleh Scaperland dan Mauer (1969) adalah indikator makro perekonomian. Hasil penelitian Prachowny (1972) perekonomian dan investasi suatu negara juga dipengaruhi oleh stabilitas politik, fundamental ekonomi makro dan keamanan, dapat disimpulkan adanya peningkatan risiko dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya dalam perekonomian dan akhirnya tidak akan ada pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan suatu negara.

Berdasarkan penelitian Suharto (2011) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan variabel PDB, tingkat suku bunga, nilai tukar, ekspor, dan inflasi terhadap investasi asing, dan berimplikasi terhadap perekonomian di Indonesia 1972- 2010. Penelitian Suharto ini memperkuat hasil penelitian Widodo dan Tarsidin (2007) yang menyimpulkan bahwa pengaruh tingkat bunga, nilai tukar, inflasi meningkatkan risiko pada sektor usaha ekonomi di Indonesia. Penelitian Alfin Yulistino dan Oktarani (2008) juga menyimpulkan tentang perdagangan internasional, investasi asing langsung dan investasi portofolio serta perkembangan pasar uang dapat meningkatkan kinerja perekonomian di negara ASEAN.

Studi yang meneliti tentang keterkaitan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan penyerapan tenaga kerja dilakukan oleh Fitriadi (2008) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur. Dan dalam penelitian ini juga menguraikan bahwa pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini terjadi penurunan tingkat kemiskinan.

Penelitian Bahrudin (2011) menyimpulkan adanya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah membuktikan bahwa transfer pemerintah sangat penting peranannya dalam perekonomian daerah di era otonomi sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan menurunkan kemiskinan suatu daerah.

Penelitian Rachim (2005) tentang pengaruh struktur pendapatan dan belanja pemerintah kota terhadap kemandirian wilayah dan perkembangan kegiatan sosial di Kota Samarinda menyimpulkan tentang penggunaan PAD dan dana perimbangan (transfer pemerintah) dalam pembangunan berpengaruh signifikan, sehingga kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang berarti dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Penelitian PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Publik berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran pada studi kasus di 38 kabupaten/kota seluruh Jawa Timur diteliti oleh Hamzah (2007). Siswanto dan Mulyanti (2012) menyimpulkan bahwa transfer pemerintah, PAD dan TK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dipengaruhi secara positif signifikan oleh transfer pemerintah dan TK namun signifikan secara negatif oleh PAD.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hambarsari dan Inggit (2016) mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Dengan nilai koefisien sebesar negatif (-3,779). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Artinya apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan tingkat kemiskinan turun sebesar 3,779. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Suryandari (2018) juga meneliti tentang pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data *cross section* di 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY dengan *time series* selama 11 tahun mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara individu berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai *probability* 0,0059 terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam teori Kuznet yang mengatakan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati tahap akhir pembangunan terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, artinya pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat

pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa padat modal.

Suindyah (2009) dalam penelitiannya tentang pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan semakin meningkatnya investasi yang masuk ke Jawa Timur khususnya investasi asing akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Jumlah tenaga kerja yang bekerja akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengeluaran pemerintah juga akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi, karena dengan semakin bertambahnya pengeluaran pemerintah akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka perlu adanya peningkatan kualitas SDM yang akan memasuki pasar kerja, agar mereka mudah dan dapat digunakan oleh perusahaan/ pengguna tenaga kerja. Selain itu, dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi, ini bukan berarti bahwa pengeluaran pemerintah harus ditingkatkan secara besar-besaran tanpa arah yang jelas, tetapi peningkatan pengeluaran pemerintah itu harus diimbangi dengan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor atau bidang.

Pangkiro *et al.* (2016) juga meneliti tentang pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data kemiskinan dan Disparitas ekonomi Provinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2013 serta penulis menggunakan metode regresi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jawaban sebagai turunya angka Disparitas Ekonomi. Tingkat kemiskinan yang meningkat akan memperbesar angka Disparitas Ekonomi. Dan ini menjadi tugas pemerintah untuk memperhatikan sektor penyerap tenaga kerja sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi.

Parasan *et al.* (2016) tentang analisis belanja pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masih merupakan tujuan utama dan indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, dengan pertumbuhan Ekonomi yang tinggi diharapkan berpengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat dengan berkurangnya kemiskinan. Sulawesi Utara adalah salah satu pusat perekonomian di pulau Sulawesi, dalam meningkatkan Pertumbuhan ekonomi di daerah ini membutuhkan komitmen kuat dari pihak pemerintah dan swasta. Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi swasta memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja

pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan investasi swasta dan belanja pemerintah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, besarnya pengaruh investasi swasta dan belanja pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi tidak dapat di jadikan variabel intervening.

Agustini dan Kurniasih (2017) dalam penelitiannya mengenai pengaruh investasi PMDN, PMA, dan penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa investasi PMDN, PMA dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi memberikan dampak yang baik bagi penyerapan tenaga kerja terutama pada sektor perkebunan. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar di sektor ini perlu didukung oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, diharapkan melalui berbagai kebijakan dan keberpihakan kepada petani maka produktivitas petani juga akan meningkat, pada akhirnya kemiskinan yang identik dengan keluarga petani dapat dikurangi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 10 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Para pembuat kebijakan diharapkan tidak hanya menekankan aspek kuantitas dari pertumbuhan ekonomi, namun yang terpenting adalah memberikan perhatian yang lebih pada struktur dan kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Hasan (2017) juga meneliti tentang analisis struktur ekonomi dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur ekonomi berkontribusi dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, struktur ekonomi juga berkontribusi langsung dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kamar (2017) dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja, membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin tinggi nilai pertumbuhan ekonomi penyerapan tenaga kerja justru rendah, hal ini dikarenakan banyaknya sektor ekonomi yang mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Tangerang. Investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin tinggi investasi maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi dan investasi secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin tinggi nilai pertumbuhan ekonomi dan investasi maka akan meningkatkan nilai penyerapan tenaga kerja.

Romdhoni (2017) dalam penelitiannya tentang pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah, menunjukkan investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain apabila investasi meningkat maka peluang penyerapan tenaga kerja juga meningkat. Dalam hal variabel perlu ditambahkan tidak hanya investasi, sehingga analisis terhadap penyerapan tenaga kerja lebih teranalisis secara komprehensif.

Ardiansyah *et al.* (2018) juga meneliti tentang pengaruh jumlah unit usaha, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data time series. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Giovanni (2018) tentang analisis pengaruh PDRB, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di pulau Jawa tahun 2009-2016, juga menjelaskan bahwa pulau Jawa memiliki 6 provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi terdapat di 4 provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, sedangkan 2 provinsi lainnya yaitu Provinsi DKI dan Banten tingkat kemiskinannya tergolong rendah, sehingga penelitian ini hanya mengambil 4 provinsi yang tingkat kemiskinannya tergolong tinggi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor tersebut menggunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengangguran dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY pada tahun 2009-2016, sedangkan PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi tersebut.

Saraswati dan Ramantha (2018) dalam penelitiannya tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal dan investasi swasta sebagai moderasi, menjelaskan bahwa pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Diharapkan dengan adanya penerimaan dari PAD dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah, peningkatan PAD dapat meningkatkan Belanja Modal pemerintah daerah, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam bidang investasi swasta. Penelitian ini dilakukan pada 9 kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja Modal memperlemah pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan

Ekonomi, sedangkan Investasi Swasta memperkuat pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Putra dan Yasa (2018) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pengangguran, Adanya pengaruh negatif signifikan secara langsung antara upah minimum regional terhadap pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan secara langsung, sedangkan UMR dan pengangguran memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara langsung terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali cenderung meningkat dan sebab itu memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi jika disertai dengan distribusi pendapatan yang merata akan memberikan efek yang lebih maksimal terhadap pengurangan kemiskinan, sehingga pemerintah hendaknya dapat meningkatkan kesempatan kerja di daerah-daerah yang masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Kajian penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas padat diringkas pada setiap jalur hubungan antar variabel, seperti terlihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu
Berdasarkan Jalur Hubungan Antar Variabel

No.	Pengaruh Antar Variabel	Dasar Empirik (Penelitian Sebelumnya)
1	Investasi pemerintah → pertumbuhan ekonomi	Rachim (2005), Suindyah (2009), Bahrudin (2011), Siswanto dan Mulyanti (2012), Parasan <i>et al.</i> (2016) Agustini dan Kurniasih (2017), Saraswati dan Ramantha (2018)
2	Investasi pemerintah → penyerapan tenaga kerja	Rachim (2005), Suindyah (2009), Amelia (2014), Wasilaputri (2016), Romdhoni (2017), Kamar (2017), Agustini dan Kurniasih (2017), Nurhayati (2018)
3	Investasi swasta → pertumbuhan ekonomi	Parasan <i>et al.</i> (2016), Agustini dan Kurniasih (2017), Saraswati dan Ramantha (2018)
4	Investasi swasta → penyerapan tenaga kerja	Amelia (2014), Wasilaputri (2016), Romdhoni (2017), Kamar (2017)
5	Pertumbuhan ekonomi → penyerapan tenaga kerja	Fitriadi (2008), Kamar (2017), Ardiansyah <i>et al.</i> (2018), Putra dan Yasa (2018)
6	Pertumbuhan ekonomi → tingkat kemiskinan	Suharto (2011), Bahrudin (2011), Hambarsari dan Inggit (2016) Pangkiro <i>et al.</i> (2016) Parasan <i>et al.</i> (2016), Agustini dan Kurniasih (2017), Suryandari (2018) Giovanni (2018)
7	Penyerapan tenaga kerja → tingkat kemiskinan	Hasan (2017), Agustini dan Kurniasih (2017), Giovanni (2018)

